



18 JUNI 2016

Proyek Talud Beraroma Korupsi



Mendapat untung dari setiap proyek yang dikerjakan, memang menjadi keinginan setiap rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah. Tapi, bila untung yang ingin diraup jauh lebih banyak dari jumlah anggaran yang dialokasikan, tentu menimbulkan kekhawatiran, adanya mark up anggaran, penyalahgunaan anggaran, hingga hasil pekerjaan yang tidak berkualitas.

Setidaknya, kondisi seperti itu juga yang dikhawatirkan terjadi pada proyek Talud pemukiman

di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Anggaran ratusan juta dialokasikan pemerintah untuk membangun Talud itu. Tapi, diduga bermasalah. Sebab, ditemukan sejumlah kejanggalan. Namun, pihak rekanan memastikan, telah bekerja sesuai kontrak.

Proyek tersebut didanai APBD provinsi Maluku tahun 2016. Pemerintah, melalui Dinas Pekerjaan Umum menetapkan PT. Daya Bangun Cipta sebagai pelaksana proyek bernilai Rp 683 juta lebih itu. Sejak proyek Talud sepanjang 190 meter mulai dikerjakan, warga di sekitar lokasi proyek itu sudah menaruh curiga. Diantaranya karena anggaran yang digunakan, tidak sampai 50 persen dari total jumlah anggaran yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan hasil pantauan warga setempat, ada indikasi tidak beres dalam pekerjaan proyek tersebut. Sebab, pihak rekanan diketahui menggunakan Semen sebanyak 300 Sak dengan total harga Rp19 juta, pasir 20 Rit Rp28 juta, batu 50 Rit Rp40 juta, Kerikil 5 Rit Rp2 juta, dan biaya lain tak terduga sekitar Rp20 juta.

Dengan begitu, hingga proyek selesai dikerjakan, baru menghabiskan uang sekitar Rp100 juta lebih. Artinya, tersisa Rp533 juta lebih yang diduga menjadi hasil mark up, bila dikurangi dengan nilai proyek Rp683 juta sekian itu. Kami sudah siapkan data-data untuk melaporkan secara resmi ke Kejaksaan,” kata ketua RT 002/RW05, desa Poka, Hasan Boinauw kepada Ambon Ekspres, Jumat (17/6).

Langkah melaporkan masalah tersebut, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan penggunaan Dana yang tidak sampai separuh dari total anggaran yang disediakan pemerintah itu, dikhawatirkan, Talud hanya dibangun sekadarnya alias asal jadi tanpa mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan.

“Laporan ke Kejaksaan nanti sebagai bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat dalam mengontrol proses pembangunan,” katanya. Sementara itu, bos PT. Daya Bangun Cipta, Hendro yang dihubungi untuk dikonfirmasi membantah dugaan tersebut. Tidak ada mark up dalam proyek tersebut. Pihaknya telah bekerja sesuai kontrak. “Bahkan, kami bekerja, volume pekerjaan itu melebihi kontrak, karena tidak ingin ada masalah dalam pekerjaan ini,” katanya via seluler, kemarin.

Ditegaskan, jumlah anggaran yang dihabiskan untuk menyelesaikan proyek tersebut, bukan lebih dari hasil kalkulasi warga tersebut. Ini sudah sesuai dengan kontrak kerja. “Saya ini ikut lelang secara resmi. Sehingga saya kerja resmi, sesuai kontrak. Tidak ada mark up, tidak ada masalah,” katanya.